

Determinisme Teknologi dan Industri Buzzer: Pembusukan Komunikasi Politik di Media Sosial

Dicky Wahyudi

¹Universitas Brawijaya, Malang

¹dickywahyudi366@gmail.com

Abstract

Technological determinism provides a free digital public space on social media while bringing together political opportunities that maintain buzzers. The rise in democracy has worsened with the emergence of hoaxes, fake news and hate narratives in public spaces on social media. The research aims to explain the condition of Indonesian political communication amidst technological determinism and the buzzer industry on social media. To fulfill these objectives, this research uses a qualitative approach method with literature studies, as well as Fukuyama's concepts of political order and political decay; and McLuhan's concept of technological determinism. The results of this research show that political communication is heading towards worsening conditions in the public space on social media, poor legal supremacy of the ITE Law, and a crisis of trust experienced by the government. Therefore, it is necessary to reorganize political communication on social media by improving regulations on digital public spaces, and combining political literacy with media literacy for the community.

Keywords: *Technological Determinism, Buzzer Industry, Public Space, Political Communication, Social Media*

Abstrak

Determinisme teknologi menyediakan ruang publik digital yang bebas di media sosial, sekaligus mempertemukan para oportunist politik yang memelihara buzzer. Konsekuensinya demokrasi memburuk dengan bermunculannya hoaks, fake news, dan narasi kebencian ruang publik di media sosial. Penelitian bertujuan menjelaskan kondisi komunikasi politik Indonesia di tengah determinisme teknologi dan industri buzzer di media sosial. Untuk memenuhi tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan studi literature, serta konsep political order and political decay dari Fukuyama; dan konsep technological determinism dari McLuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik sedang menuju ke arah pembusukan dengan memburuknya kondisi ruang publik di media sosial, buruknya supremasi hukum UU ITE, dan krisis kepercayaan yang dialami oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan re-order komunikasi politik di media sosial dengan perbaikan regulasi ruang publik digital, dan memadukan literasi politik dengan literasi media bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Determinisme Teknologi, Industri Buzzer, Ruang Publik, Komunikasi Politik, Media Sosial*

Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) begitu pesat dirasakan oleh masyarakat saat ini, bahkan TIK berhasil mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Misalnya di bidang sosial, TIK (seperti media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok, dll) menjadi ruang berinteraksi bersama (Hall, 2018; Litt et al., 2020), menciptakan imajinasi baru baik sifatnya personal maupun sosial (Edwards et al., 2013). Di bidang pendidikan, TIK telah determinan mengubah pola pembejaraan dari sekedar luring menjadi daring (Adeline & Irwansyah, 2022). Di bidang budaya, TIK mampu memproduksi dan mereproduksi budaya yang ada di masyarakat (Boeri, 2016; Dafoe, 2015)

Selanjutnya di bidang ekonomi, TIK begitu dieluh-eluhkan karena dianggap menjadi pendobrak pertumbuhan ekonomi di suatu negara melalui digital economy (Berisha-Shaqiri & Berisha-Namani, 2015; Ugli, 2020). Di bidang politik, TIK begitu perkasa dalam menentukan alur politik. Misalnya saja TIK yang diwakili oleh media massa atau pun new media yang logikanya mampu mengkolonisasi logika politik – yang biasa disebut dengan mediatisasi politik (Stromback, 2008). Selain itu, media sosial juga saluran komunikasi politik bagi para politisi dan partai politik (Heryanto, 2018). Hal ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh McLuhan (1964) mengenai technological determinism tidaklah berlebihan, karena memang sedang dirasakan oleh masyarakat saat ini.

Technological determinism dikonsepsikan McLuhan (1964) sebagai kondisi ketika teknologi memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan manusia, teknologi dianggap mampu menentukan

kehidupan masyarakat. Konsepsi ini juga dirumuskan oleh oleh McLuhan (1964) dengan istilah “medium is the message”, yakni pesan bukan merujuk pada konten di dalam media, tetapi media itu sendiri adalah pesan yang mampu menentukan (determinan) kehidupan masyarakat (Dafoe, 2015; Morissan, 2018). Jadi, pesan yang dimaksud dalam konteks ini adalah TIK, bukan pada konten yang berada di media sosial – TIK berhasil mengubah lanskap ekonomi dan politik di Indonesia.

Menurut Fukuyama (2015), ketika lanskap ekonomi berubah, maka tatanan sistem politik di suatu negara-pun akan beradaptasi mengikuti perubahan ekonomi. Fukuyama (2015) menjelaskan bahwa jika sistem politik dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, maka sistem politik akan mengalami penataan sistem yang lebih kuat (political order). Sebaliknya, jika sistem politik tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, maka sistem politik tersebut akan mengalami pembusukan (political decay). Pembusukan politik ditandai dengan memburuknya tiga institusi antara lain tatanan negara (the state); tatanan supremasi hukum (rule of law); dan akuntabilitas demokrasi (democratic accountability) (Fukuyama, 2015).

Lebih lanjut, Fukuyama (2015) menjelaskan bahwa ketika tiga institusi (the state; rule of law; democratic accountability) tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-politik yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, maka yang terjadi demokrasi akan mengalami pembusukan (political decay). Politicay decay dalam konsepsi Fukuyama (2015) mengarah pada hal-hal destruktif terhadap tiga institusi penyangga sistem politik demokrasi, seperti korupsi, tindak

kriminalitas yang tidak terselesaikan oleh hukum, akuntabilitas yang manipulatif, ketidak harmonisan struktural politik, konflik sosial, serta ekonomi yang menurun.

Bahkan di era sekarang ini, political decay bukan hanya sekedar deteksi secara struktural, tetapi deteksi secara kritis seperti krisis kepercayaan kepada penguasa atau pemerintah yang menjalankan tatanan negara merupakan sinyal political decay (Arvanitopoulos, 2022; Kumar, 2020; Vergara, 2021). Sinyal lain yang dapat menjadi petanda political decay yang berpotensi merubah sistem politik yakni memburuknya komunikasi politik di ruang publik, seperti hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan narasi destruktif lainnya. Sinyal komunikasi politik buruk inilah yang ditandai dengan bermunculannya buzzer politik (Felicia & Loisa, 2018; Juditha, 2019; Mustika, 2019), bahkan buzzer politik telah menjadi industri (Patria, 2021; Sugiono, 2020).

Sugiono (2020) menjelaskan bahwa buzzer politik di Indonesia telah menjadi industri yang menumbuhkan ekonomi, artinya di sini buzzer politik ini telah menjadi profesi dalam bidang komunikasi politik. Fenomena buzzer sebagai profesi industri politik menandakan mereka (para buzzer) ini memiliki tuan. Sebagaimana temuan riset LP3S dan Universitas Leiden yang menyatakan buzzer di Indonesia dipelihara oleh elite politik untuk kepentingan-kepentingannya dalam ranah kontestasi politik maupun kebijakan politiknya (Patria, 2021). Jadi, buzzer politik di Indonesia sebagai sebuah industri telah memiliki tuan sebagaimana kapitalisme ekonomi-politik bekerja di ranah new media.

Buzzer politik di Indonesia menarasikan komunikasi politik ke arah destruktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Juditha (2019) bahwa buzzer politik meresahkan bagi masyarakat karena memproduksi informasi yang menyesatkan, informasi ini meliputi narasi kebencian, hoaks, secara personal terhadap tokoh publik/politisi, hingga fitnah yang terklasifikasi sebagai perilaku kriminal di ruang siber. Permasalahan yang dihadapi, buzzer ini menggunakan akun bot yang tidak terdeteksi 'siapa' di balik akun tersebut (Fatmala et al., 2020). Bahkan ketika mempertemukan dua kandidat politik, ruang publik siber dipenuhi perang narasi dari para buzzer yang mempolarisasi masyarakat (Afrimadona, 2021; Syahputra, 2017).

Fenomena industri buzzer politik menghadirkan dilema, di satu sisi dampak buruknya tidak mendidik masyarakat, di sisi lain menjadi keniscayaan pada era demokrasi digital (Aspinall & Mietzner, 2019). Keniscayaan memang tidak dapat dipungkiri, tetapi bila keniscayaan ini membawa dampak buruk, maka keniscayaan ini perlu 'diamputasi' dengan cara apapun. Bukan tanpa alasan, bila buzzer tetap dipandang sebagai keniscayaan, maka narasinya akan mengeksploitasi sisi emosional masyarakat yang dapat memecah-belah keutuhan bangsa, yang disebut oleh West (2019) dengan divided nation (bangsa terbelah).

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini akan mengulas bagaimana kondisi komunikasi politik di media sosial dengan determinisme teknologi dan industri buzzer di Indonesia?. Sebagai bahan diskusi dan analisis, penelitian ini akan menggunakan pemikiran McLuhan (1964) mengenai 'technological determinism' dengan premis utama bahwa

teknologi mampu mengubah kehidupan manusia, dalam hal ini adalah TIK yang menghadirkan buzzer politik sebagai industri. Kemudian, menggunakan pemikiran Fukuyama (2015) mengenai 'political order and political decay' dengan premis utama bahwa pertumbuhan ekonomi akan memaksa sistem politik beradaptasi di suatu negara. Dalam hal ini, mengenai bagaimana kondisi komunikasi politik beradaptasi dengan munculnya industri buzzer akibat determinisme TIK di Indonesia.

Kajian Pustaka

Technical Determinism

Seperti dikonsepsikan oleh McLuhan (1964) bahwa teknologi memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan manusia, teknologi dianggap mampu mengubah kehidupan masyarakat. Hal inilah yang disebut McLuhan (1964) sebagai konsep technological determinism yang didalilkan dengan istilah "medium is the message". McLuhan (1964) ingin menerangkan bahwa tidak penting konten di dalam media, tetapi yang penting adalah media yang digunakan itu sendiri. Misalnya seperti handphone yang penting bukan konten/pesan yang diucapkan oleh pengguna melalui handphone, tetapi yang penting adalah handphone tersebut telah berhasil mengubah pola komunikasi penggunaannya.

Menurut McLuhan (1964), kehadiran teknologi telah menciptakan revolusi di tengah kehidupan masyarakat, oleh karenanya masyarakat sangat tergantung oleh media. Dari konsep ini juga teknologi dipandang sebagai kepanjangan indera manusia, misalnya dicontohkan oleh McLuhan (1964) bahwa buku merupakan kepanjangan mata seseorang, karena

gambar yang ada di buku membuat kita bisa mengetahui tempat tertentu yang sebenarnya secara fisik belum melihat secara langsung. Seperti juga roda kendaraan yang dianggap kepanjangan dari kaki seseorang, karena mengantarkan seseorang berpergian kemanapun yang dituju. Inilah yang dimaksud determinisme teknologi oleh McLuhan (1964)

Sekarang ini, TIK yang termanifestasi menjadi new media -jika memakai kaca mata perspektif determinisme teknologi-, maka new media bukan sekedar lagi ruang tempat pesan diproduksi atau pun disebarluaskannya pesan, tetapi new media merupakan pesan itu sendiri yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat. Sebagaimana beberapa studi yang mengungkapkan new media yang menjadi produk TIK telah berhasil mengubah lensa ekonomi dan sosial kehidupan masyarakat (Berisha-Shaqiri & Berisha-Namani, 2015; Boeri, 2016).

Kembali lagi, ini semua bukti dari terwujudnya konsepsi McLuhan (1964) mengenai determinisme teknologi yang mampu mengubah lanskap kehidupan masyarakat. Khususnya dalam hal ini telah membawa dampak pada penyebaran ekonomi yang memunculkan beragam profesi. Namun demikian, salah satu profesi yang dihadirkan oleh teknologi new media yakni buzzer politik menjadi cukup meresahkan bagi masyarakat, dan menjadi industri yang dipelihara oleh elite politik (Patria, 2021; Sugiono, 2020).

Sebagaimana beberapa studi seperti dari Fatmala et al., (2020); Juditha (2019); Mustika (2019) yang mengungkapkan buzzer politik di Indonesia membuat narasi yang memecah belah kerukunan

warga, memproduksi hoaks, menimbulkan kebencian, dan melakukan penyerangan terhadap personal seseorang dalam konteks politik. Fenomena inilah yang akan diulas lebih lanjut dalam artikel ini, yakni mengenai bagaimana TIK memfasilitasi buzzer politik sebagai industri dalam paradigma determinisme teknologi.

Political Order and Political Decay

Francis Fukuyama sebagai seorang sosiolog yang mengamati interaksi politik melalui perspektif ideologi ekonomi-politik dengan konsisten menerangkan perubahan politik. Misalnya, dalam bukunya 'The End of History and The Last Man', Fukuyama mengungkapkan bahwa ideologi-ideologi besar dunia (komunisme, sosialisme, fasisme) telah mati dengan diakhiri oleh kemenangan kapitalisme (Fukuyama, 2003, terjemahan, tahun asli 1992). Kemudian, di dalam bukunya 'The Great Disruption', Fukuyama juga menjelaskan kapitalisme-neoliberalisme menyebabkan kekacauan besar dengan merubah tatanan sosial-politik, menguatkan individualisme dan mereduksi kolektivisme sehingga berkecamuk kriminalitas (Fukuyama, 2002, terjemahan, tahun asli 1997).

Pada tahun 2015, Fukuyama pun meneruskan analisisnya mengenai perubahan sistem politik yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Analisis ini dimanifestasikan dalam buku yang berjudul "Political Order and Political Decay". Di sini, Fukuyama memberikan premis utama bahwa kelangsungan atas suatu sistem politik di sebuah negara akan sangat tergantung pada sejauh mana mereka dapat beradaptasi dengan kondisi sosial

baru yang diciptakan oleh suatu pertumbuhan ekonomi (Fukuyama, 2015).

Fukuyama melanjutkan premis utamanya bahwa jika sistem politik dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, maka sistem politik tersebut akan mengalami penataan sistem (political order) yang lebih kuat. Sebaliknya, jika sistem politik tidak dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi, maka sistem politik tersebut akan mengalami pembusukan (political decay) (Fukuyama, 2015).

Pemikiran Fukuyama (2015) mengenai 'political order and political decay' menandakan pentingnya memahami sistem politik dari dimensi perubahan sosial dan perubahan ekonomi. Sistem politik yang sebenarnya tidak pernah stabil atau dengan kata lain selalu ada gejolak dinamika yang dapat merubah sistem politik tersebut. Fukuyama (2015) memberikan tiga institusi penting yang dapat memperkuat sistem politik atau melakukan penataan sistem politik yang ideal sebagaimana esensi demokrasi. Tiga institusi ini adalah 1) The State (Tatanan Negara); 2) Rule of Law (Tatanan Supremasi Hukum); dan 3) Democratic Accountability (Akuntabilitas atas suatu proses demokrasi) (Fukuyama, 2015; Vergara, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis sebagai world view terhadap permasalahan memburuk komunikasi politik di ruang publik. Menurut Bryman (2012), paradigma konstruktivis merupakan cara pandang mengenai fenomena sosial yang menolak kebenaran tunggal

(generalis-objektif yang menjadi karakteristik paradigma positivis), dan berusaha mengkonstruksi pengetahuan berdasarkan interpretasi terhadap fenomena sosial. Paradigma konstruktif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan kondisi komunikasi politik di media sosial dengan hadirnya determinisme media dan industri buzzer politik di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan literatur dari artikel penelitian jurnal ilmiah yang mengulas kondisi komunikasi politik di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data-data dari lembaga riset yang telah dipublikasikan dan artikel pemberitaan media massa mengenai industri buzzer di Indonesia. Jadi, teknik dokumentasi dengan studi kepustakaan yang akan dimanfaatkan sebagai data adalah artikel jurnal yang terbit selama 5 tahun terakhir (2017-2022), data-data publikasi lembaga riset, dan artikel pemberitaan media massa mengenai mengenai industri buzzer di Indonesia.

Data yang diperoleh melalui dokumentasi dengan studi kepustakaan dianalisis menggunakan interaktif dari Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang meliputi kondensasi data (pemadatan data dan pengkodean), penyajian data (pengkategorisasian data yang telah diberi dipadatkan dan dikodekan), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (refleksi dan interpretasi untuk mendapatkan kejenuhan data). Penelitian ini juga memanfaatkan konsep technological determinism dari McLuhan (1964) dan konsep political order and political decay

dari Fukuyama (2015) sebagai landasan diskusi teoritis terhadap data-data yang telah dilakukan analisis interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri Buzzer Politik di Media Sosial: Akumulasi Teknologi Determinisme dan Demokrasi

Buzzer politik di Indonesia bukan sekedar volunteristik, atau sekedar relawan dari politisi. Lebih dari itu, buzzer politik di Indonesia telah menjadi profesi untuk mendapatkan pasokan ekonomi dari tuannya. Sebagaimana hal ini diungkapkan dalam temuan penelitian dari LP3S yang berkolaborasi dengan Universitas Diponegoro, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Islam Indonesia dan Drone Emprit yang menyebutkan bahwa buzzer politik jumlahnya cukup banyak, mereka memiliki koordinator yang diistilahkan dengan 'kakak pembina', dan mereka menjadi alat bagi para elite politik dan elite ekonomi di Indonesia sebagai alat untuk memanipulasi opini publik di media sosial untuk melancarkan berbagai kepentingan mereka masing-masing (Madrah & Mubarak, 2018; Patria, 2021).

Studi dari Sugiono (2020) juga menjelaskan bahwa buzzer politik sebagai industri mengalami perkembangan semenjak tahun politik 2012 (Pilgub DKI Jakarta), kemudian menuju 2014 (Pilpres), semakin massif pada tahun 2017 (Pilgub DKI Jakarta), dan memuncak pada Pilpres tahun 2019. Hal ini dikuatkan oleh studi Fernandes (2018) yang spesifik mengulas buzzer politik dari tahun 2018 menjelang Pilpres 2019, di mana hasilnya menunjukkan bahwa buzzer politik dari masing-masing kubu (Jokowi dan Prabowo) menarasikan pesan politik yang

bernuansa agama, khususnya mengenai gerakan aksi masa 212 pada tahun 2016 dan rentetan kegiatan aksi masa tersebut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bagaimana buzzer dipelihara oleh tuannya guna saling menjatuhkan lawan politik dan menjunjung tuan politiknya.

Para buzzer politik bersembunyi di balik akun anonym atau akun robot. Akan tetapi, ada buzzer yang memanfaatkan akun official-nya untuk menjalankan profesi ini. Hal ini ditunjukkan oleh studi dari Saraswati (2018) yang menjelaskan bawah buzzer yang menggemakan pesan-pesan politik (khususnya menjelang atau saat kampanye politik) tidak hanya melalui akun yang bersifat anonym, tetapi juga akun official. Bahkan Saraswati (2018) menemukan buzzer dari kalangan selebgram dan komedian yang memakai akun aslinya untuk mendongungkan politisi maupun menyerang lawan politik. Hal ini menunjukkan bagaimana buzzer telah menjadi profesi alternatif atau pun menarik minat para kalangan selebritis, komedian, hingga selebgram untuk mendongungkan pesan-pesan politik.

Profesi buzzer politik juga dijalankan oleh mahasiswa, sebagaimana diungkapkan oleh studi Felicia & Loisa (2018) yang menjelaskan buzzer politik sebagai industri telah secara profesional mengadakan open recruitment terhadap kalangan mahasiswa yang memiliki pandangan ideologi yang sama terhadap calon pasangan tertentu. Buzzer dari kalangan muda dipilih karena kemampuan mereka menggunakan teknologi serta kreativitas dalam menyusun pesan-pesan politik. Fenomena ini mencerminkan bahwa kehadiran teknologi yang memfasilitasi profesi

buzzer telah mengubah orientasi mahasiswa dari esensi intelektualitas menjadi banalitas politik. Hal ini sekaligus memperkuat dalil McLuhan (1964) mengenai determinisme teknologi yang mampu merubah kehidupan, memunculkan profesi buzzer yang ditekuni oleh mahasiswa.

Berdasarkan wawancara antara Lipson (dalam Sugiono, 2020) dengan salah satu politisi dari partai politik di Indonesia, gaji dari profesi buzzer memang sangat menggiurkan, oleh karena itu tidak mengherankan para selebritis, komedian, mahasiswa, hingga para akademisi dari perguruan tinggi menekuni profesi buzzer politik. Mekanismenya, akan ada 'seorang' elite (politisi/pengusaha) yang membayar akun yang telah menjadi selebritis di media sosial. Tujuannya tidak lain untuk mendukung atau pun menyerang kelompok politik tertentu. Juditha (2019) pun juga menemukan bahwa para buzzer politik menarasikan komunikasi politik yang deskriptif, baik itu dalam bentuk menyanjung politik tertentu atau pun menjatuhkan politik tertentu.

Buzzer politik sebagai industri di Indonesia menghasilkan akumulasi ekonomi yang tinggi, merujuk studi dari Bradshaw & Howard (2019) menjelaskan bahwa buzzer di Indonesia digaji mulai dari 1 hingga 50 juta Rupiah. Menurut laporan koresponden ABC Australia, mengatakan bahwa partai politik berani membayar buzzer sebesar US\$ 500 untuk setiap konten yang diunggah. Dalam laporan itu pula, salah satu komentator politik Indonesia pernah ditawarkan menjadi seorang buzzer partai politik dengan bayaran US\$ 1000 per bulan, namun tawaran tersebut ditolak. Selain itu ada, pula buzzer yang menawarkan

suatu paket dimana mereka akan mencari berbagai keburukan dari lawan politik dari pengguna jasa dengan harga 200 juta perbulan.

Beberapa fakta tersebut menegaskan bahwa pesta demokrasi di Indonesia turut menumbuhkan industri-industri yang menghancurkan mentalitas bangsa. Meskipun pada akhirnya buzzer politik merupakan implikasi dari sistem demokrasi (Syahputra, 2017), namun upaya untuk memperbaiki cara kerja buzzer harus dilakukan oleh semua pihak. Pelaku industri buzzer dapat dikatakan sebagai penganut paham kapitalisme, karena memanfaatkan momentum Pemilu untuk mendapatkan keuntungan finansial (Sugiono, 2020). Namun juga tidak dapat terlupakan, buzzer politik ini muncul juga karena fasilitas teknologi yang memberinya ruang (McLuhan, 1964), kemudian sistem demokrasi yang mendalilkan kebebasan mendorong buzzer untuk mendengarkan pesan politik yang membodohkan publik.

Buzzer dan Pembusukan Komunikasi Politik: Public Sphere or Water Closet?

Buzzer politik beroperasi ketika menjelang masa kampanye politik, bahkan sebelum masa kampanye dimulai guna membentuk opini publik (Hidayat, 2020; Mustika, 2019). Studi dari Bradshaw & Howard (2019) menunjukan bahwa fenomena industri buzzer politik bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di berbagai negara. Data spesifik menunjukan penggunaan buzzer dalam konteks berpolitik sebanyak 89% dari 70 negara, buzzer digunakan untuk memanipulasi opini publik dengan cara mendukung pilihan politik maupun menyerang lawan politiknya. Hal ini

menunjukkan bahwa memang buzzer ini adalah fenomena global yang tercipta dari determinisme teknologi baru dan sistem politik yang menghendaki kebebasan.

Sementara itu di Indonesia, beberapa riset seperti Mustika (2019), Juditha (2019), Felicia & Loisa (2018) menjelaskan bahwa buzzer digunakan oleh politisi dan partai politik dalam membangun opini dan dukungan publik terhadap suatu calon pemimpin, dan menyerang lawan politik dengan segala informasi seperti hoaks, fitnah, serangan personal. Sugiono (2020) juga menemukan bahwa industri buzzer di Indonesia memiliki kecenderungan membangun narasi politik (mendukungdan menyerang) menggunakan akun-akun palsu dengan jumlah besar yang dikendalikan baik oleh manusia maupun robot. Juditha (2019) juga menegaskan masifnya pesan politik yang diproduksi oleh buzzer menyebabkan topik pembicaraannya akan menjadi trending topic di media sosial.

Studi dari Syahputra (2017) menjelaskan bahwa buzzer di Indonesia lebih mengedepankan ujaran kebencian, percakapan yang saling mencera, perdebatan yang penuh amarah bahkan merupakan agen yang menyebarkan hoax kepada masyarakat. Temuan studi dari Syahputra (2017) ini menunjukan betapa negatifnya buzzer bagi narasi komunikasi politik di ruang publik media sosial, harapan Habermas (1993) yang menginginkan ruang publik sebagai tempat berbagi gagasan/ide dan mendiskusikan permasalahan umum guna mencapai konsensus tak terwujud dengan kehadiran buzzer politik. Sekarang yang terwujud adalah ruang publik yang penuh kebencian, ruang publik pun menjadi

tempat produksi narasi kebencian para buzzer politik.

Namun demikian, ada juga buzzer dari kalangan akademisi yang menarasikan komunikasi politik secara akademis, tetapi dengan tujuan memanipulasi opini publik. Hal ini ditunjukkan oleh temuan riset dari Jati (2016) yang menunjukkan lingkup kerja buzzer politik adalah memproduksi kultwit (kuliah twitter) atau mini-story dengan gaya bahasa yang akademis dan teknokrat, mendistribusikan pesan dengan akun anonim, konten-konten yang bersifat hit and run serta testing the water (bersifat sementara dan hanya untuk melihat aksi-respons dari pengguna media sosial kelas menengah). Alhasil narasi komunikasi politik dari buzzer sifatnya pragmatis bagi kepentingan tuannya, bahkan mengarah oportunistis jangka pendek – tanpa ada pendidikan politik kepada publik.

Komunikasi politik yang dibuat oleh buzzer kerap menciptakan berbagai konten kampanye yang bersifat provokatif. Menurut studi dari Sugiono (2020), narasi provokatif ini dimaksudkan agar para user media sosial lainnya ikut turut serta dalam menarasikan konten-kontennya – alhasil menciptakan narasi komunikasi politik yang lebih luas, walaupun narasi politik tersebut buruk dampaknya bagi publik. Sugiono (2020) menambahkan bahwa pengguna media sosial lain ini akan mudah ikut menyebarkan konten yang diproduksi oleh buzzer apabila memiliki ideologi yang sama dan kepentingan yang sama. Hal ini memperlihatkan bahwa khalayak dijadikan komoditas agar pelaku industri tidak perlu mengeluarkan modal lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Kondisi komunikasi politik yang penuh dengan narasi kebencian dan bersifat destruktif, bahkan menimbulkan ketidakakraban masyarakat menunjukkan negatifnya keberadaan buzzer politik bagi tatanan sosial di Indonesia. Dalam pemikiran Fukuyama (2015), tatanan sosial yang berubah inilah yang memiliki korelasi dengan sistem politik – atau bahkan menghadirkan tatanan politik baru. Alhasil, industri buzzer telah mengantarkan komunikasi politik di Indonesia mengalami pembusukan (political decay), bagaimana tidak? Bila narasi yang dihasilkan sekedar fitnah, serangan personal, pembunuhan karakter, kebencian terhadap kelompok lain, hingga produksi hoaks yang membuat masyarakat semakin terbelah seperti kontestasi Pilpres 2019 yang memunculkan dikotomi logika biner antara cebong dan kampret.

Indikasi pembusukan komunikasi politik yang disebabkan oleh narasi para buzzer ini juga tercermin dari temuan studi Sugiono (2020) yang menjelaskan bahwa para buzzer digunakan oleh tokoh publik yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi alat pertahanan diri pemerintah dalam melumpuhkan buzzer lawan politiknya. Pada tataran ini, indikasi political decay dari Fukuyama (2015) pun telah terjadi, yakni rule of the law yang tidak memberikan keadilan bagi publik, tidak memiliki supremasi hukum, dan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dalam negara demokrasi.

Pembusukan politik yang dimulai dari institusi rule of the law (Fukuyama, 2015) begitu nyata terlihat dalam supremasi UU

ITE yang berelasi langsung dengan komunikasi politik yang diproduksi oleh para buzzer, atau menjadi lingkup hukum operasional para buzzer. UU ITE dimaksudkan untuk menjaga ruang digital tetap dalam koridor yang baik. Namun yang terjadi justru UU ITE memiliki pasal karet sehingga digunakan oleh elit pemerintahan untuk melawan rakyatnya sendiri (Sugiono, 2020). Idealnya UU ITE untuk mengatur lalu-lintas informasi di ruang siber dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, justru UU ITE menjadi instrument politik, baik itu pemerintah maupun kelompok lain untuk saling mengintip kesalahan dan mengkriminalisasi lawan politik.

Pembusukan politik yang terdeteksi dari institusi rule of the law (penegakan UU ITE) dan komunikasi politik dengan narasi kebencian yang diproduksi oleh para buzzer telah membuat ruang publik bertransformasi menjadi water closet atau tempat buang hajat politik – sehingga bukan lagi ruang publik yang mencerdaskan publik dengan partisipasi politik guna mencapai kesepakatan bersama (Habermas, 1993), sekarang ruang publik tak ubahnya seperti water closet yang mengeluarkan “bau busuk” seperti narasi politik kebencian yang membuat permusuhan warga negara. Pada tataran inilah, sebenarnya diperlukan political reorder (Fukuyama, 2015), atau penataan politik ulang sehingga menghasilkan komunikasi politik yang bermutu.

Re-Order Komunikasi Politik di Media Sosial

Fakta memburuknya ruang publik tidak bisa dipungkiri, perdebatan politik dengan penuh sentimen, narasi kebencian,

fitnah, hoaks, serangan personal, dan pembunuhan karakter (Juditha, 2019; Mustika, 2019; Syahputra, 2017) merupakan wujud nyata dari pembusukan komunikasi politik. Keadaan komunikasi politik yang menuju political decay, sebagaimana dikonsepsikan oleh Fukuyama (2015) tidak bisa didiamkan begitu saja di Indonesia. Perlu ada perubahan secara mendasar terhadap komunikasi politik itu sendiri, karena komunikasi politik yang ada sekarang tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan TIK yang melahirkan industri buzzer politik. Waluyo (2019) juga mengungkapkan butuh pemahaman baru mengenai komunikasi politik untuk merespon perkembangan digital, karena pemahaman akan konsepsi komunikasi politik jauh berbeda dengan era sebelum digitalisasi internet.

Perlunya konsepsi baru mengenai komunikasi politik ini menandakan perlunya re-order atau penataan ulang dari praktik komunikasi politik itu sendiri. Komunikasi politik dengan narasi kebencian yang menimbulkan polarisasi di masyarakat (Afrimadona, 2021; Sujoko, Khotimah, et al., 2022) tidak mungkin untuk dipertahankan, bila menginginkan bangsa Indonesia tumbuh sebagai bangsa yang beradab. Padahal bangsa Indonesia inheren memiliki nilai kultur harmonisasi dalam praktik politik – di mana hal ini dapat dilacak melalui tulisan para pujangga terdahulu di Jawa (Sujoko, 2021). Begitu juga Pancasila sebagai falsafah bangsa yang menghendaki nilai gotong-royong (Sujoko et al., 2021) dalam praktik komunikasi politik, bukan narasi kebencian seperti yang ada sekarang ini.

Praksis untuk mewujudkan re-order komunikasi politik dapat dilakukan

melalui dua hal utama, yakni: Pertama, melakukan perbaikan regulasi yang mengatur ruang publik dan memberikan literasi politik kepada masyarakat. Perbaikan regulasi yang mengatur ruang publik ini diperlukan karena penegakan UU ITE (sebagai rule of law disebutnya oleh Fukuyama, 2015) telah mengalami involunsi, atau dinilai memiliki pasal karet yang justru membuat ruang publik semakin gaduh dan komunikasi politik semakin memburuk (Sugiono, 2020). Oleh karena itu, perbaikan UU ITE untuk mengatur ulang komunikasi politik yang ada pada saat ini merupakan praksis yang mesti dijalankan.

Melakukan re-order komunikasi politik tidak cukup dengan hanya memperbaiki UU ITE untuk menertibkan buzzer di ruang publik digital. Oleh karena itu, diperlukan formulasi yang kedua, yakni harus ada desain literasi politik kepada masyarakat maupun para politisi sebagai komunikator politik. Literasi politik yang baik dari masyarakat akan berdampak pada pengetahuan politik, sikap politik, dan perilaku politik yang ditunjukkan dalam partisipasinya dalam sistem politik dan narasi komunikasi politik di ruang publik (Hopkins & Coster, 2019; Sujoko, Izzah, et al., 2022). Dengan begitu akan tumbuh demokrasi yang sehat berbasis partisipasi masyarakat dan literasi politik.

Perlunya literasi politik di Indonesia juga diungkapkan oleh Azmy (2018); Fadhillah & Nuryadi (2021); Rafni & Suryanef (2017), diperlukan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia pada era digital. Namun demikian, Allam et al., 2021; Rianto, 2019; Ridha & Riwanda, 2020) mengungkapkan bahwa literasi politik kepada warga harus

disertai dengan literasi media (menggunakan media, mengolah informasi politik, dan menyebarkan informasi politik melalui media) yang digunakan sebagai saluran komunikasi politik di ruang publik digital. Oleh karena itu, literasi politik yang dipadukan dengan literasi media dapat menjadi praksis untuk melakukan re-order komunikasi politik di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan pembusukan komunikasi politik di media sosial terjadi karena kehadiran TIK yang secara deterministik memunculkan industri buzzer politik yang dimanfaatkan oleh para elite politik untuk memanipulasi opini publik. Buzzer politik memproduksi narasi politik yang destruktif seperti hoaks, kebencian, fitnah, serangan personal terhadap lawan politik dan mendukung kepentingan tuan politiknya. Secara tegas, buzzer politik telah mengubah lanskap ruang publik digital menjadi "tempat buang hajat politik" (water closet). Studi ini merekomendasikan re-order komunikasi politik di Indonesia dengan memperbaiki regulasi UU ITE yang mengatur informasi politik di ruang publik digital (media sosial), dan perlunya literasi politik dan literasi media bagi masyarakat.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi para scholar untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengkaji hubungan industri buzzer politik dan kondisi komunikasi politik di media sosial dengan menggunakan metodologi yang sistematis dan terukur berbasis pendekatan kuantitatif korelasional. Dengan begitu akan didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai

hubungan industri buzzer politik dan komunikasi politik dalam ruang publik digital di Indonesia

REFERENCES

- Adeline, C., & Irwansyah. (2022). Determinisme Teknologi: Penggunaan ICT dalam Pembelajaran Daring. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 46–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.7041>
- Afrimadona. (2021). Revisiting Political Polarisation in Indonesia: A Case Study of Jakarta's Electorate. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 315–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1868103421100749>
- Allam, S. N. S., Hassan, M. S., Ridzuan, A. R., Mohideen, R. S., & Ilyas, I. Y. (2021). How Media Literacy Competency Contribute to Political Participation Integrity Among Young People. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(4), 814–832. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i4/9021>
- Arvanitopoulos, C. (2022). The state of American democracy after Trump. *European View*, 21(1), 91–99. <https://doi.org/10.1177/17816858221089399>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(2), 104–118.
- Azmy, A. S. (2018). Political Literacy And Money Politics In Indonesia The Phenomena of Money Politics in Jakarta's Local Election on 2017. *Third International Conference on Social and Political Sciences*, 198–200. www.news.detik.com,
- Berisha-Shaqiri, A., & Berisha-Namani, M. (2015). Information Technology and the Digital Economy. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 78–83. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6p78>
- Boeri, N. (2016). Technology and society as embedded: an alternative framework for information and communication technology and development. *Media, Culture and Society*, 38(1), 107–118. <https://doi.org/10.1177/0163443715607845>
- Bradshaw, S., & Howard, P. N. (2019). The Global Disinformation Order 2019

- Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th Edition). Oxford University Press.
- Dafoe, A. (2015). On Technological Determinism: A Typology, Scope Conditions, and a Mechanism. *Science Technology and Human Values*, 40(6), 1047–1076. <https://doi.org/10.1177/0162243915579283>
- Edwards, A., Housley, W., Williams, M., Sloan, L., & Williams, M. (2013). Digital social research, social media and the sociological imagination: Surrogacy, augmentation and re-orientation. *International Journal of Social Research Methodology*, 16(3), 245–260. <https://doi.org/10.1080/13645579.2013.774185>
- Fadhillah, D. N., & Nuryadi, M. H. (2021). The Innovation of Political Literacy on Millennial Generation Based on Android. *Proceeding ICHELSS*, 431–440.
- Fatmala, D. R., Amelia, A., & Trianingsih, F. A. (2020). Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik: Sebuah Tinjauh Hukum. *Audikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 55–68. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>
- Felicia, & Loisa, R. (2018). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Koneksi*, 2(2), 352–359.
- Fernandes, A. (2018). Politik identitas dalam Pemilu 2019 proyeksi dan efektivitas. *Center for Strategic and International Studies*, 1–9.
- Fukuyama, F. (2002). *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*. Penerbit Qalam.
- Fukuyama, F. (2003). *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dalam Demokrasi Liberal*. Penerbit Qalam.
- Fukuyama, F. (2015). *Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Habermas, J. (1993). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Hall, J. A. (2018). When is social media use social interaction? Defining mediated social interaction. *New Media and Society*, 20(1), 162–179.

- <https://doi.org/10.1177/1461444816660782>
- Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik. IRCiSoD.
- Hidayat, R. N. (2020). Penggunaan Buzzer Politik di Media Sosial Pada Masa Kampanya Pemilihan Umum. ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan, 4(2), 29–38. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15606>
- Hopkins, N., & Coster, W. (2019). The Levellers, political literacy and contemporary Citizenship education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 14(1), 68–81. <https://doi.org/10.1177/1746197918760084>
- Jati, W. R. (2016). Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial: Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 147–162.
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 2019, 199–212.
- Kumar, S. H. M. (2020). The Colonial Genealogies of Political Decay and Legitimation Crises: An Enquiry into the Predicament of State-construction in Post-colonial South Asia. *India Quarterly*, 76(2), 276–293. <https://doi.org/10.1177/0974928420917802>
- Litt, E., Zhao, S., Kraut, R., & Burke, M. (2020). What Are Meaningful Social Interactions in Today’s Media Landscape? A Cross-Cultural Survey. *Social Media and Society*, 6(3). <https://doi.org/10.1177/2056305120942888>
- Madrah, M. Y., & Mubarok. (2018). Netizen dalam Kampanye Pilpres RI 2014. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 16–25.
- McLuhan, M. (1964). *Media Understanding: The Extensions of Man*. McGraw Hill.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. In *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods* (Third Edition). Sage Publications. <https://doi.org/10.1177/239700221402800402>

- Morissan. (2018). Teori Komunikasi Individu hingga Massa (Edisi Pertama). Kencana Prenadamedia Group.
- Mustika, R. (2019). Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 144–151. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.60>
- Patria, I. K. R. (2021). Hasil Riset: Buzzer Jadi Alat bagi Kepentingan Elite Politik. *BeritaBali.Com*. <https://www.news.beritabali.com/read/2021/10/16/202111020029/hasil-risetbuzzer-jadi-alat-bagi-kepentingan-elite-politik?page=2>
- Rafni, A., & Suryanef. (2017). Roles of Democratic Volunteers in Developing Political Literacy 1. *MIMBAR*, 33(1), 74–80.
- Rianto, P. (2019). Literasi Digital dan Etika Media Sosial di Era Post-Truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24–35.
- Ridha, M., & Riwanda, A. (2020). Literasi Media, Literasi Politik, dan Partisipasi Kewarganegaraan Pemilih Pemula di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 110–121. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jpk>
- Saraswati, M. S. (2018). Social Media and the Political Campaign Industry in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(1), 51–65. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v3i1.124>
- Stromback, J. (2008). Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. *International Journal of Press/Politics*, 13(3), 228–246. <https://doi.org/10.1177/1940161208319097>
- Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 47–66. <https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>
- Sujoko, A. (2021). Communication from an Ancient Javanese Perspective: Discovering the Cultural Values Conveyed in Serat Wedha Satya by Ranggawarsita. *Italienisch*, 11(2), 372–381. <http://www.italienisch.nl>
- Sujoko, A., Izzah, Z. Al, & Wahyudi, D. (2022). Cross-Cutting Affiliation in

- Regional Election in Indonesia. *Komunikator*, 14(2), 169–181. <https://doi.org/10.18196/jkm.15169>
- Sujoko, A., Khotimah, K., Masyitah, A. D., & Wahyudi, D. (2022). Controversial Behavior of Political Elites in Indonesia During The Covid-19. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2), 275–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/al-balagh.v6i2.3402>
- Sujoko, A., Saintio, F. A., & Wahyudi, D. (2021). Identitas Keindonesiaan dalam Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 188–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jik.v19i2.4609>
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual dan Ruang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 457–475.
- Ugli, A. N. R. (2020). The role of digital economy and ICT in developing economics of Uzbekistan. *International Journal of Researc & Development*, 5(3), 31–33. <https://doi.org/10.36713/epra2016>
- Vergara, C. (2021). Corruption as systemic political decay. *Philosophy and Social Criticism*, 47(3), 322–346. <https://doi.org/10.1177/0191453719868265>
- Waluyo, D. (2019). Pemahaman dan Praktik Komunikasi Politik Indonesia di Era Digital. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(2), 160–167. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.63>
- West, D. M. (2019). *Divided Politics, Divided Nation: Hyperconflict in the Trump Era*. Brookings Institution Press.